



RENJA SKPD 2018



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Jaksa Agung Suprpto - Lamongan
Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312
E-mail : dinpmd@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan baik.

RENJA OPD 2018 ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun, dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan.

RENJA OPD 2018 ini memuat Program dan Kegiatan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan dengan mengantisipasi perkembangan mendatang. Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA OPD 2018 ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami menerima kritik, saran dan masukan dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan RENJA OPD 2018.

Sekian dan terima kasih.

Lamongan, April 2017

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**



KHUSNUL YAOQIN, S.Si

Pembina

NIP. 1919670524 199302 1 004

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1. Latar Belakang	1
	2. Landasan Hukum	2
	3. Maksud dan Tujuan	3
	4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.....	5
	1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	5
	2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	6
	3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	9
	4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	13
	5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	18
	1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	18
	2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	19
	3. Program dan Kegiatan.....	20
BAB IV	PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah sebagai rencana tahunan, sehingga berdampak kepada penyempurnaan system perencanaan dan penganggaran baik dari sisi proses, mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Sehubungan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana berikut :

- 1) RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 (lima) tahun sekali;
- 2) RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, kondisi umum yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi maupun Kabupaten;
- 3) Renstra OPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi tujuan, strategi, kebijaka, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;
- 4) Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;

- 5) RKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

2. LANDASAN HUKUM

Sehubungan dengan keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, maka Rencana Kerja (RENJA) berdasar pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 13) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025
 - 17) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014
 - 18) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015
 - 19) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan;
 - 20) Keputusan Bupati Nomor : 64 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lamongan

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) dimaksudkan agar Pola Pembangunan yang akan dilakukan oleh sebuah instansi dapat dijalankan secara sistematis, teratur, terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat dan pendukung sehingga dampak yang akan terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir dan diantisipasi.

Tujuan Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Desa Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Desa Kabupaten Lamongan sebagaimana diuraikan dalam RENSTRA OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Desa Kabupaten Lamongan.
- 2) RENSTRA OPD Menjadi Pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Desa dalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan sehingga hasilnya dapat dicapai dan diukur secara komprehensif dan obyektif.

- 3) Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;

4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

**1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA
OPD**

TABEL EVALUASI RENJA TAHUN 2016

**INSTANSI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
LAMONGAN**

2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Adapun Analisa Capaian Kinerja setiap pelaksanaan kegiatan Tahun 2016 antara lain :

- 1) Pengumpulan, Updating dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan (Pendataan swadaya masyarakat) dengan target tersedianya data swadaya murni masyarakat pada 474 Desa/Kelurahan dan terealisasi sebanyak 474 Desa/Kelurahan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 29.719.400 dari alokasi sebesar Rp. 30.000.000 atau 99.06%
- 2) Penyusunan Profil Daerah, dengan target tersedianya data tingkat perkembangan Desa/Kelurahan yang akurat dan sebagai bahan acuan program pembangunan Desa/Kelurahan sebanyak 1 Buku Laporan Laporan, 1 Unit Notebook, 1 Unit Peralatan Jaringan dan terealisasi tersedianya data tingkat perkembangan Desa/Kelurahan yang akurat dan sebagai bahan acuan program pembangunan Desa/Kelurahan sebanyak 1 Buku Laporan Laporan, 1 Unit Notebook, 1 Unit Peralatan Jaringan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 150.000.000 dari alokasi sebesar Rp. 150.000.000 atau 100%
- 3) Meningkatnya program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak dilaksanakan dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak (Pelatihan Konseling Pendamping PPT) dengan target terlaksananya pelatihan SDM Pelayanan dan Pendamping PPT sebanyak 120 orang dan terealisasi terlaksananya pelatihan SDM Pelayanan dan Pendamping PPT sebanyak 120 orang dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 49.847.500 dari alokasi sebesar Rp. 50.000.000 atau 99.70%
- 4) Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan dilakukan dengan 2 Kegiatan :
- 5) kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah (Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)) dengan target 83 orang perempuan diwilayah Kabupaten Lamongan dan terealisasi sebanyak 83 orang perempuan diwilayah Kabupaten Lamongan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 49.711.750 dari alokasi sebesar Rp. 50.000.000 atau 99.42%
- 6) kegiatan pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan terealisasi 120 orang, 20 buah mesin jahit dan terealisasi sebanyak 120 orang, 20 Mesin jahit dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 219.917.250 dari alokasi sebesar Rp. 220.000.000 atau 99.98%

- 7) Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Taman Posyandu) terealisasi sebanyak 135 Orang Kader Posyandu se-Kab. Lamongan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 249.985.750 dari alokasi sebesar Rp. 250.000.000 atau 99.99%.
- 8) kegiatan revitalisasi Posyandu dengan target 270 kader Posyandu Se-Kab.Lamongan 3 unit almari, 1 unit kamera dan terealisasi sebanyak 180 kader posyandu se-kab.Lamongan, 3 unit almari, 1 unit kamera dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 104.929.500 dari alokasi sebesar Rp. 105.000.000 atau 99.93%
- 9) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu dengan target 425 orang dan terealisasi sebanyak 425 orang dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 175.000.000 dari alokasi sebesar Rp. 175.000.000 atau 100%
- 10) Pelatihan Ketyerampilan Bagi keluarga miskin (Ahli Tehnologi Tepat Guna dan pemanfaatan SDA di Pedesaan) dengan target 30 masyarakat miskin di pedesaan, terealisasi sebanyak 30 masyarakat miskin di perdesaan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 74.200.000 dari alokasi sebesar Rp. 75.000.000 atau 98.93%
- 11) Fasilitasi Perguliran Dana Simpan Pinjam untuk perempuan (SPP) berbasis pemberdayaan masyarakat dengan target 27 Kecamatan, 2 unit Komputer,1 Printer, terealisasi sebanyak 27 Kecamatan, 2 unit Komputer,1 Printer dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 298.841.000 dari alokasi sebesar Rp. 300.000.000 atau 99.61%
- 12) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa dengan target 30 Orang , terealisasi sebanyak 30 orang dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 49.200.000 dari alokasi sebesar Rp. 50.000.000 atau 98.40%
- 13) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dengan target 100 Orang , terealisasi sebanyak 100 orang dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 149.890.000 dari alokasi sebesar Rp. 150.000.000 atau 99.93%
- 14) Peringatan Hari Jadi Lamongan dengan target 1 Kegiatan, terealisasi sebanyak 1 kegiatan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 50.000.000 dari alokasi sebesar Rp. 50.000.000 atau 100%
- 15) Penganuhgrahan bagi pelaku Pemberdayaan Masyarakat dengan target 1000 orang pelaku Pemberdayaan Pengurus LPMdan KPMD di Kabupaten Lamongan,terrealisasi sebanyak 1000 orang dengan anggaran yang telah

teralisasi sebesar Rp. 189.638.300 dari alokasi sebesar Rp. 190.000.000 atau 99.81%

- 16) Usaha Pengurus UPKu Desa dengan target 27 Kecamatan di kabupaten lamongan terealisasi sebanyak 27 Kecamatan di kabupaten Lamongan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 49.904.250 dari alokasi sebesar Rp. 50.000.000 atau 99.81%
- 17) Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Penanggulangan Kemiskinan dengan target 26 Desa 10 Kecamatan di kabupaten lamongan terealisasi sebanyak 26 Desa 10 Kecamatan di kabupaten Lamongan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 99.849.500 dari alokasi sebesar Rp. 100.000.000 atau 99.85%
- 18) Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa (LPM & KPMD)) dengan target 501 Pengurus LPM dan KPMD di Kabupaten Lamongan , terealisasi sebanyak 501 Pengurus LPM dan KPMD di Kabupaten Lamongan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 100.000.000 dari alokasi sebesar Rp. 100.000.000 atau 100%
- 19) Fasilitas Dana Desa dengan target 462 Desa di Kab.Lamongan terealisasi sebanyak 462 Desa di Kab.Lamongan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 248.858.550 dari alokasi sebesar Rp. 250.000.000 atau 99.54%
- 20) Pembinaan Desa Mandiri energy berbasis Bio gas dengan target 2 desa di 2 Kecamatan di Kabupaten Lamongan terealisasi sebanyak 2 desa di 2 kecamatan di kabupaten Lamongan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 99.890.000 dari alokasi sebesar Rp. 100.000.000 atau 99.89%
- 21) Fasilitas Gerakan Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera di Perdesaan dengan target 24 Orang di Kabupaten Lamongan terealisasi sebanyak 24 orang di kabupaten Lamongan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 120.582.000 dari alokasi sebesar Rp. 125.000.000 atau 96,47%
- 22) Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa/kelurahan dengan target 474 desa/kelurahan dikabupaten lamongan dan terealisasi sebanyak 474 desa/kelurahan di kabupaten lamongan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 75.000.000 dari alokasi sebesar Rp. 75.000.000 atau 100%
- 23) Fasilitas Bagi Hasil Pajak/retrebusi dengan target 27 Kecamatan di Kabupaten Lamongan dan terealisasi 27 Kecamatan di Kabupaten Lamongan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 68.764.250 dari alokasi sebesar Rp. 75.000.000 atau 91.69%

- 24) Pengembangan BUMDes dengan target 110 BUMDesa di Kabupaten Lamongan, terealisasi sebanyak 110 BUMDesa di Kabupaten Lamongan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 299.931.000 dari alokasi sebesar Rp. 300.000.000 atau 99.98%
- 25) Pemberdayaan Lembaga Pasar desa dengan target 2 Lembaga dan 10 Pasar desa di Kabupaten Lamongan , terealisasi sebanyak 2 Lembaga dan 10 Pasar desa di Kabupaten Lamongan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 168.746.000 dari alokasi sebesar Rp. 170.000.000 atau 99.26%
- 26) Pembinaan Pasar desa dengan target 6 pasar desa di kabupaten Lamongan , terealisasi sebanyak 6 Pasar desa di kabuapten Lamongan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 99.804.000 dari alokasi sebesar Rp. 100.000.000 atau 99.80%
- 27) Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam bidang Pembangunan Desa (bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat) dengan target 1 kegiatan, terealisasi sebanyak 1 kegiatan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 100.000.000 dari alokasi sebesar Rp. 100.000.000 atau 100%
- 28) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa) dengan target 474 desa / Kelurahan di Kabupaten Lamongan, terealisasi sebanyak 474 Desa / Kelurahan di Kab. Lamongan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 199.784.250 dari alokasi sebesar Rp. 200.000.000 atau 99.89%
- 29) Pemberiaan stimulan Pembangunan Desa target 586 lokasi di kabupaten Lamongan, terealisasi sebanyak 586 lokasi di kabupaten Lamongan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 246.800.000 dari alokasi sebesar Rp. 250.000.000 atau 98.72%
- 30) Pembiaaan dan Lomba Potensi/tingkat Perkembangan desa dengan target 1 Kegiatan dan terealisasi 1 Kegiatan di Kabupaten Lamongan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 99.816.250 dari alokasi sebesar Rp. 100.000.000 atau 99.82%
- 31) Pelatihan Kader Perencanaan Teknis Desa dengan target 135 Orang, 1 unit notebook, 1 unit LCD dan terealisasi 135 Orang, 1 unit notebook, 1 unit LCD dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 142.625.250 dari alokasi sebesar Rp. 150.000.000 atau 95.08%
- 32) Pembinaan Lembaga HIPDAM dengan target 100 Orang dan terealisasi 100 Orang, dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 160.424.750 dari alokasi sebesar Rp. 165.000.000 atau 97.23%

- 33) Monitoring dan Evaluasi Bhakti Karya TNI dengan target 260 Lokasi di Kabupaten Lamongan dan terealisasi 260 Lokasi di Kabupaten Lamongan dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 40.000.000 dari alokasi sebesar Rp. 40.000.000 atau 100%
- 34) Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif (Penyelenggaraan Manajemen Usaha PKK Desa dan bimbingan kader PKK Desa) dengan target 150 Kader PKK, terealisasi sebanyak 150 kader PKK dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 50.000.000 dari alokasi sebesar Rp. 50.000.000 atau 100%
- 35) Pembinaan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dengan target 4 Kegiatan POKJA, terealisasi sebanyak 4 Kegiatan POKJA dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 500.000.000 dari alokasi sebesar Rp. 500.000.000 atau 100%.
- 36) Program Peningkatan Kapasitas Iptek sistem Produksi dilakukan dengan melalui kegiatan pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri dengan target 30 Orang , terealisasi 30 Orang dengan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 95.000.000 dari alokasi sebesar Rp. 95.000.000 atau 100%

3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat.

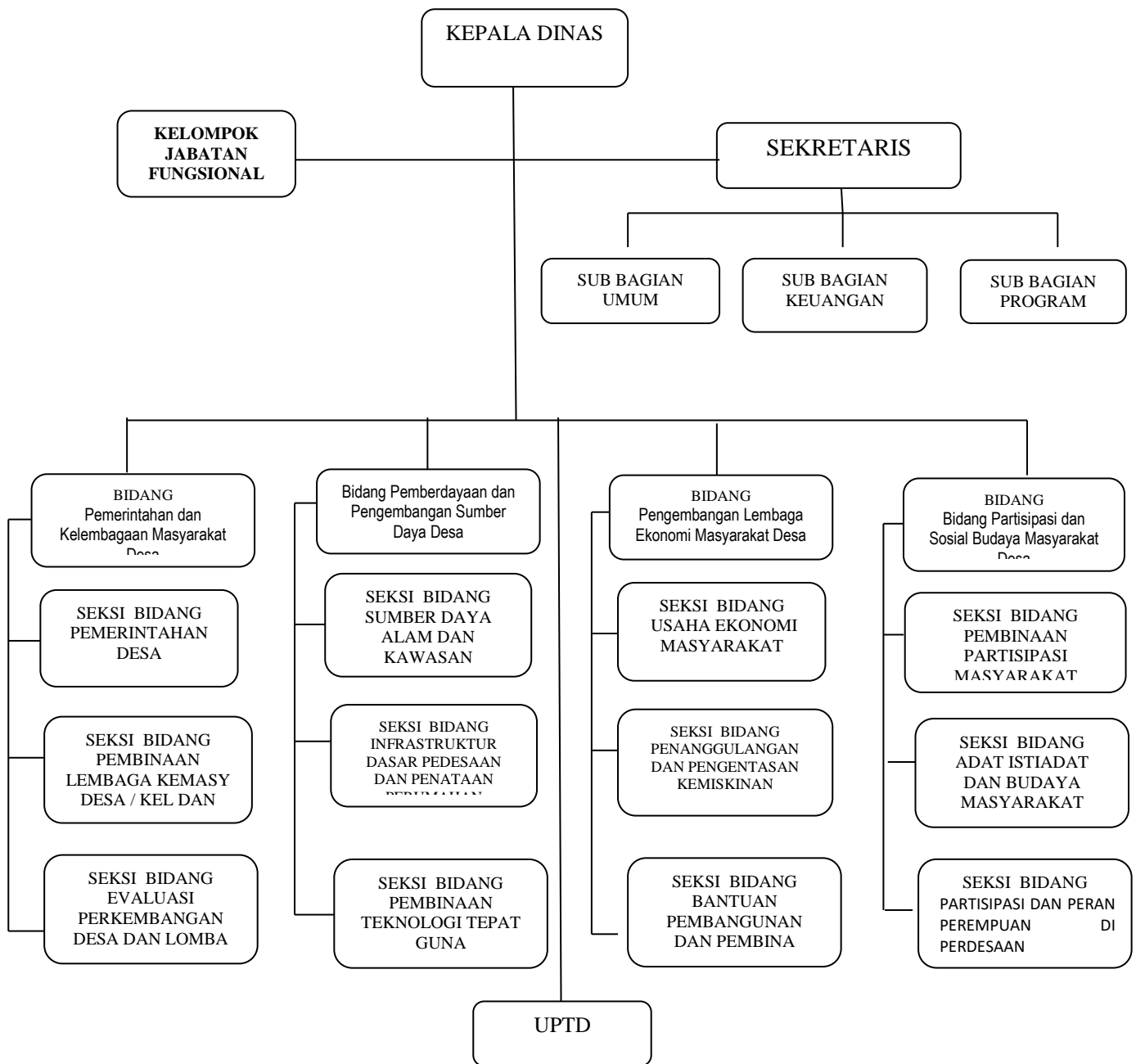
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan disusun dalam struktur organisasi terdiri atas :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat.
 - 2.1. Sub Bagian Umum.
 - 2.2. Sub Bagian Keuangan.
 - 2.3. Sub Bagian Program.
3. Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa.
 - 3.1. Seksi Pemerintahan Desa
 - 3.2. Seksi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kel dan SDM
 - 3.3. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa
4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber daya Desa
 - 4.1. Seksi Sumberdaya alam dan Kawasan Terpadu
 - 4.2. Seksi Infrastruktur dasar perdesaan dan Penataan Perumahan Pemukiman
 - 4.3. Seksi Pembinaan Teknologi Tepat Guna
5. Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa
 - 5.1. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat
 - 5.2. Seksi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan
 - 5.3. Seksi Bantuan Pembangunan dan Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat.
6. Bidang Partisipasi dan social Budaya Masyarakat Desa
 - 6.1. Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Budaya Masyarakat Desa
 - 6.2. Seksi Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat
 - 6.3. Seksi Partisipasi dan Peran Perempuan di Perdesaan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. UPTD

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**



1. Personil

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan didukung oleh 41 orang, yang mempunyai latar belakang pendidikan mulai dari SLTP sampai dengan Magister (S2).

NO	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	KET
1	Kepala Badan	1	Pembina Tingkat I IV.b	1	S.2	1	
2	Sekretaris	1	Pembina I IV.a	1	S.2	1	
3	Kepala Bidang	4	Pembina Tk. I IV.b	3	S.2	3	
			Pembina IV.a	1	S.2	1	
4	Kepala Subbidang/ subbag	11	Penata Tk. I III.d	8	S.1	8	
			Penata III.c	3	S.1	3	
5	Staf	33	Penata Tk. I III.d	2	S.1	2	
			Penata III.c	3	S.1	3	
			Penata Muda Tk. I III.b	6	S.1	4	
					SLTA	2	
			Penata Muda III.a	5	S.1	5	
			Pengatur II.c	2	SLTP	2	
			Pengatur Muda TK. I II.b	1	SLTA	1	
			Pengatur Muda II.a	2	SLTA	1	
					SLTP	1	
			Tenaga Kontrak	12	S.1	5	
SLTA	5						
SLTP	2						
JUMLAH		50		50		50	

Tabel I : Data Kepegawaian Tahun 2016

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan tugas sehari-hari, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana tabel II.

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Mobil Roda 4	5	
2	Motor Roda 2	13	
3	Tustel	4	
4	Mesin Ketik	5	
5	Calculator	11	
6	Mesin Stensil	1	
7	Feling Kabinet	10	
8	Rak Besi	1	
9	Rak Kayu	1	
10	Almari Besi	1	
11	Brankas	3	
12	Whiteboard	2	
13	Almari Kayu	9	
14	Kursi Kerja	92	
15	Meja Kerja	54	
16	Meja Kursi Tamu	1	
17	Kipas angin	5	
18	Kamera	1	
19	Meja Rapat	10	
20	Telepon	2	
21	Computer	17	
22	Tabung Pemadam Kebakaran	1	
23	Intercom	2	
24	Printer	9	
25	Pompa air	1	
26	Tempat sampah besar	1	
27	Overhead	1	
28	AC	2	
29	Soundsystem	1	
30	Handycam	1	
31	Dispenser	2	
32	LCD	2	
33	Laptop	4	
34	Kamera Digital	3	
35	UPS	1	

Tabel II : Data Sarana dan Prasarana Tahun 2016

3. Pembiayaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	KET.
I.	Belanja Daerah	Rp. 8.752.311.000,-	
1.	<u>Belanja Tidak Langsung</u> Belanja Pegawai	Rp. 2.657.863.000,- Rp. 2.657.863.000,-	
2.	<u>Belanja Langsung</u> a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal	<u>Rp. 6.094.448.000,-</u> Rp. 502.504.000,- Rp. 4.967.620.600,- Rp. 324.323.400,-	

Tabel III : Data Keuangan Sumber Dana dari APBD Tahun 2016.

4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dana yang digunakan untuk mendukung dan mewujudkan pencapaian sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :

KODE REKENING				URAIAN	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	(%)
1				2	3	4	5	6
0	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 640,948,000.00			
0	00	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 2,000,000.00	2,000,000.00	0	100%
0	00	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 131,254,000.00	90,372,987.00	90,372,987.00	68.85 %
0	00	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 5,000,000.00	5,000,000.00	0	100%
0	00	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 6,000,000.00	3,023,800.00	2,976,200.00	50.40%
0	00	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 50,000,000.00	50,000,000.00	0	100%
0	00	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 72,000,000.00	72,000,000.00	0	100%
0	00	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 55,000,000.00	53,477,250.00	1,522,750.00	97.23
0	00	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 13,000,000.00	12,999,000.00	1,000.00	99.99%

0	00	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	15,000,000.00	15,000,000.00	0	100%
0	00	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	5,000,000.00	4,890,000.00	110,000.00	97.80%
0	00	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	40,000,000.00	36,060,000.00	3,940,000.00	90.15%
0	00	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp	55,000,000.00	54,374,062.00	625,938.00	98.86%
0	00	01	19	Penyediaan Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan	Rp	191,694,000.00	189,892,500.00	1,801,500.00	99.06%
0	00	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	34,500,000.00	34,500,000.00	0	100%
0	00	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp	34,500,000.00	34,500,000.00	0	100%
0	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	439,000,000.00			
0	00	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp	154,000,000.00	154,000,000.00	0	100%
0	00	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp	125,000,000.00	125,000,000.00	0	100%
0	00	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Rp	35,000,000.00	27,025,834.00	7,974,166.00	77.22%
0	00	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp	58,000,000.00	30,953,736.00	27,046,264.00	53.37%
0	00	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp	15,000,000.00	15,000,000.00	0	100%
0	00	02	42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rp	52,000,000.00	52,000,000.00	0	100%
0	00	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp	40,000,000.00	34,474,500.00	5,525,500.00	86.19%
0	00	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Rp	5,000,000.00	4,736,000.00	264,000.00	94.72%
0	00	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Rp	5,000,000.00	4,614,000.00	386,000.00	92.28%
0	00	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp	5,000,000.00	3,695,500.00	1,304,500.00	73.91%
0	00	06	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Rp	25,000,000.00	21,429,000.00	3,571,000.00	85.72%
1	06	15		Program Pengembangan Data/Informasi	Rp	180,000,000.00	179,719,400.00	280,600.00	99.84%
1	06	15	01	Pengumpulan, Updating dan Analisa data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Rp	30,000,000.00	29,719,000.00	280,600.00	99.06%
1	06	15	05	Penyusunan Profil daerah	Rp	150,000,000.00	150,000,000.00	0	100%
1	11	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Rp	50,000,000.00	49,847,500.00	152,500.00	99.70%
1	11	16	06	Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Dan Anak	Rp	50,000,000.00	49,847,500.00	152,500.00	99.70%
1	11	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Rp	270,000,000.00	269,629,000.00	371,00.00	99.86%
1	11	17	01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah	Rp	50,000,000.00	49,711,750.00	288,250.00	99.42%
1	11	17	11	Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu	Rp	220,000,000.00	220,000,000.00	0	100%
1	12	19		Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat	Rp	530,000,000.00	249,985,750.00	14,250.00	99.99%
1	12	19	01	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Taman Posyandu)	Rp	250,000,000.00	249,985,750.00	14,250.00	99.99%
1	12	19	02	Revitalisasi Posyandu	Rp	105,000,000.00	104,929,500.00	70,500.00	99.93%
1	12	19	03	Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu	Rp	175,000,000.00	175,000,000.00	0	100%
1	13	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp	965,000,000.00	961,523,050.00	3,476.950.00	99.64%
1	13	15	02	Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin (Alih TTG)	Rp	75,000,000.00	74,200,000.00	800,000.00	98.93%
1	13	15	04	Fasilitasi Perguliran Dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Rp	300,000,000.00	298,841,000.00	1,159,000.00	99.61%

1	13	15	06	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa	Rp	50,000,000.00	49,200,00.00	800,000.00	98.40%
1	13	15	09	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Rp	150,000,000.00	149,890,000.00	110,000.00	99.93%
1	13	15	11	Peringatan Hari Jadi Lamongan Sie Ziarah dan Tasyakuran	Rp	50,000,000.00	50,000,000.00	0	100%
1	13	15	12	Penganuhgrahan Bagi Pelaku Pelaku Pemberdayaan Masyarakat	Rp	190,000,000.00	189,638,300.00	361,700.00	99.81%
1	13	15	17	Pelatihan Pengurus UPKu Desa	Rp	50,000,000.00	49,904,250.00	95,750.00	99.81%
1	13	15	18	Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Penanggulangan Kemiskinan	Rp	100,000,000.00	99,849,500.00	150,500.00	99.85%
1	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp	725,000,000.00	713,094,800.00	11,905,200.00	98.36%
1	22	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa (LPM & KPMD)	Rp	100,000,000.00	100,000,000.00	0	100%
1	22	15	03	Fasilitas Dana Desa	Rp	250,000,000.00	248,858,500.00	1,141,450.00	99.54%
1	22	15	04	Pembinaan desa mandiri energi berbasis bio gas	Rp	100,000,000.00	99,890,000.00	110,000.00	99.89%
1	22	15	09	Fasilitasi Gerakan Keluarga Bangkit Mandiri dan Sejahtera di Perdesaan (Kembangmas)	Rp	125,000,000.00	120,582,000.00	4,418,000.00	96.47%
1	22	15	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Rp	75,000,000.00	75,000,000.00	0	100%
1	22	15	21	Fasilitasi Bagi Hasil Pajak / Retrebusi	Rp	75,000,000.00	68,764,250.00	6,235,750.00	99.73%
1	22	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Rp	570,000,000.00	568,48,000.00	1,519,000.00	99.73%
1	22	16	08	Pengembangan BUMDes	Rp	300,000,000.00	299,931,000.00	69,000.00	99.98%
1	22	16	09	Pemberdayaan Lembaga Pasar Desa	Rp	170,000,000.00	168,746,000.00	1,254,000.00	99.26%
1	22	16	10	Pembinaan Pasar Desa	Rp	100,000,000.00	99,804,000.00	196,000.00	99.80%
1	22	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp	1.005,000,000.00	989,450,500.00	15,549,500.00	98.45%
1	22	17	01	Pembinaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Rp	100,000,000.00	100,000,000.00	0	100%
1	22	17	02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Rp	200,000,000.00	199,784,250.00	215,750.00	99.89%
1	22	17	03	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa (Dana Pendamping Japordes)	Rp	250,000,000.00	246,800,000.00	3,200,00.00	98.72%
1	22	17	04	Pembinaan dan Lomba Potensi / tingkat Perkembangan Desa	Rp	100,000,000.00	99,816,250.00	183,750.00	99.82%
1	22	17	07	Pelatihan Kader Perencanaan Teknis Desa	Rp	150,000,000.00	142,625,250.00	7,374,750.00	95.08%
1	22	17	08	Pembinaan Lembaga Hippiam	Rp	165,000,000.00	160,424,750.00	4,575,250.00	97.23%
1	22	17	10	Monitoring dan Evaluasi Bhakti Karya TNI	Rp	40,000,000.00	40,000,000.00	0	100%
1	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Rp	550,000,000.00	550,000,000.00	0	100%
1	22	19	01	Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Rp	50,000,000.00	50,000,000.00	0	100%
1	22	19	02	Pembinaan Kader PKK	Rp	500,000,000.00	500,000,000.00	0	100%
2	07	15		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Rp	95,000,000.00	95,000,000.00	0	100%
2	07	15	05	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	Rp	95,000,000.00	95,000,000.00	0	100%

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dari penjabaran sasaran tujuan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tersebut diatas dan termaktup dalam Rencana Strategi Daerah, setelah ditelaah terdapat kesesuaian dengan tugas dan fungsi OPD, adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kepastian ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar masyarakat, kesesuaian sasarannya sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya sarana infrastruktur daerah
 - b. Meningkatnya kualitas sarana dasar pemukiman
 - c. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 2) Meningkatnya kemampuan ekonomi dan produktivitas andalan daerah, kesesuaian sasarannya sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya produksi sektor industri
 - b. Meningkatnya volume perdagangan
 - c. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- 3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kesesuaian sasarannya sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan
 - b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan
 - c. Meningkatnya pengelolaan Aparatur yang Profesional
 - d. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
 - e. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien
 - f. Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu
 - g. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib
- 4) Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib, dan aman, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, kesesuaian sasarannya sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan
 - b. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana
 - c. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial
 - d. Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah
 - e. Meningkatnya suasana yang sejuk, santun dan demokratis dalam kehidupan
 - f. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan

2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) dimaksudkan agar Pola Pembangunan yang akan dilakukan oleh sebuah instansi dapat dijalankan secara sistematis, teratur, terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat dan pendukung sehingga dampak yang akan terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir dan diantisipasi.

Tujuan Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Desa Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Desa Kabupaten Lamongan sebagaimana diuraikan dalam RENSTRA OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Desa Kabupaten Lamongan.
- 2) RENSTRA OPD Menjadi Pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Desa dalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan sehingga hasilnya dapat dicapai dan diukur secara komprehensif dan obyektif.
- 3) Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

- Misi : Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal
- Tujuan : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan damai berdasarkan nilai – nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran
- Sasaran : Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan lembaga dalam pembangunan desa
- Indikator : Prosentase desa cepat berkembang

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun program dan kegiatan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tabel matrik di bawah ini

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2018 adalah merupakan upaya pencapaian sistem akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efisien.

Namun demikian berdasarkan kajian evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yang dituangkan dalam RENJA Tahun 2018 terdapat Keberhasilan, Kegagalan dan beberapa kendala antara lain :

1. Keberhasilan dan Kegagalan.

Berdasarkan kajian dan evaluasi kinerja, Keberhasilan dari program dan kegiatan pada Badan Pemberdaan Masyarakat pada tahun 2016 adalah optimalisasi pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di perdesaan, dengan juara ketiga lomba pasar desa tingkat propinsi jawa timur di desa Kranji Kecamatan Paciran.

Sedangkan kegagalan dari program dan kegiatan pada Badan Pemberdaan Masyarakat pada tahun 2016, secara umum tidak ada, hanya pada proses penyelesaian pelaksanaan program dan kegiatan tidak tepat waktu atau tidak sesuai rencana, sebagaimana terdapat dalam kegiatan pembangunan jembatan dan jalan poros desa.

2. Permasalahan dan Kendala Utama yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

- 1) Pemenuhan program dan kegiatan target kinerja RENSTRA 2016-2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yang belum tercapai secara maksimal;
- 2) Peningkatan efektifitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- 3) Seringnya terjadi pergantian kader dan anggota pengurus kelembagaan/ organisasi di tingkat desa;

- 4) Kurangnya bantuan untuk kegiatan penyerapan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG);
 - 5) Keterbatasan pengetahuan masyarakat pedesaan sebagai subyek pembangunan kearah kemandirian;
 - 6) Belum seluruhnya fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan kecamatan / pedesaan terbangun;
3. Strategi Pemecahan Masalah untuk tahun mendatang.

Berdasarkan kajian evaluasi kinerja Tahun 2016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, agar di tahun mendatang peningkatan kinerja lebih meningkat lagi capaiannya guna lebih mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka terhadap program-program yang telah ditetapkan dan dianggarkan khususnya terkait kebutuhan dasar masyarakat (sebagaimana RPJMD 2016–2021), disarankan perencanaannya lebih dimantapkan sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Lamongan, April 2017

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**



KHUSNUL YAQIN, S.Si
Perbina

NIP. 19670524 199302 1 004